

RENCANA KERJA
(RENJA)

I N S P E K T O R A T
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
GUNUNG SUGIH
2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 tahun (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja SKPD adalah dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah menetapkan APBD setiap tahunnya, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang termuat sudah bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggarannya sudah diperhitungkan. Sehingga nantinya setiap satuan kerja dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok pengawasan di bidang pembangunan, keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset daerah.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dimaksud perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memadai.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendukung dan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah melalui penyelenggaraan tugas bidang pengawasan daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan agar penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berdaya guna, bertanggung jawab, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan.
9. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
11. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.
12. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural Inspektorat.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya rencana kerja tahun 2025 adalah bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan juga untuk menjadi bahan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Rencana Kerja tersebut berisikan rencana dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam Tahun 2025. Dengan demikian, secara umum tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah terciptanya proses penganggaran yang lebih strategis dan kredibel melalui kebijakan dan prioritas anggaran dalam program dan rencana Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah membahas program-program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah masing-masing, sehingga pencapaian kerja pembangunan 1 tahun (RKPD) secara optimal dapat menggerakkan dan mengalokasikan sumber daya dan dana anggaran belanja daerah yang strategis, terarah dan sesuai kebutuhannya. Penyusunan rencana kerja tersebut diatas, dituangkan kedalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUSASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat)
 - 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 3.2 Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Persentase temuan laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. 3. Persentase ASN yang tidak mendapat	93 %							

						hukuman disiplin.								
						4. Persentase sarana dan prasarana kantor.								
6	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan.	88 %							
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah	6 laporan	6 Laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	100
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan	12 bulan							
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	203 Orang /Bulan	87 Orang /Bulan	87 Orang /Bulan	100	116 Orang/ Bulan	116 Orang/ Bulan	100
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	22 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	11 Dokumen	100
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	16 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100

						Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan tupoksinya	12 bulan							
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	142 Orang	71 Orang	71 Orang	100	71 Orang	71 Orang	100
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	12 bulan							
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	29 Paket	26 Paket	23 Paket	23 Paket	100	23 Paket	23 Paket	100
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	29 paket	88 Paket	44 Paket	44 Paket	100	44 paket	44 paket	100
6	01	01	2.06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	18 Paket	9 Paket	9 Paket	100	9 paket	9 paket	100

6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6	01	01	2.06	09	penyelenggaraan rapat koordinasi koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi	-	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
6	01	01	2.08		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya penyediaan jasa penunjang	12 bulan							
6	01	01	2.08	02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
6	01	01	2.09		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan							
6	01	01	2.09	02	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	26 unit	13 unit	13 unit	100	13 unit	13 unit	100
6	01	01	2.09	06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	56 unit	144 unit	72 unit	72 unit	100	72 unit	72 unit	100
6	01	01	2.09	09	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitas	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100

6	01	02			PROGRAM PENYELNGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Memperoleh nilai SAKIP minimal B	88 %							
6	01	02	2. 01		Penyelenggaraam pengawasan internal	Persentase penyelenggraan Pengawasan yang dilaksnakan	88 %							
6	01	02	2. 01	0 1	pengawasan kinerja pemerintah daerah	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
6	01	02	2. 01	0 2	pengawasan keuangan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	12 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
6	01	02	2. 01	0 3	Reviu Laporan Kinerja	Presentase laporan kinerja yang dilaksanakan	94 % laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
6	01	02	2. 01	0 4	Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	43 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
6	01	02	2. 01	0 5	pengawasan desa	jumlah laporan hasil pengawasan desa	13 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
6	01	02	2. 01	0 6	kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 kerjasama	12 kerjasama	12 kerjasama	12 kerjasama	100	12 kerjasama	12 kerjasam a	100
6	01	02	2. 01	0 7	monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil	12 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100

						pemeriksaan APIP								
6	01	02	2.02		penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	88 %							
6	01	02	2.02	01	penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditangani	12 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
6	01	02	2.02	02	pengawasan dengan tujuan tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	12 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	93 %							
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 rekomendasi							
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	12 rekomendasi	24 rekomendasi	12 rekomendasi	12 rekomendasi	100	12 rekomendasi	12 rekomendasi	100
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	88 %							

6	01	03	2.02	01	pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	50 perangkat daerah	92 perangkat daerah	46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	100	46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	100
6	01	03	2.02	02	pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	3 perangkat daerah	26 perangkat daerah	13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	100	13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	100
6	01	03	2.02	03	koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 kegiatan	24 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	12 kegiatan	100
6	01	03	2.02	04	pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	3 perangkat daerah	6 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	100	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengamati tentang kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup memenuhi syarat sesuai dengan indikator kegiatan kerja (IKK) yang disusun dan diusulkan telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 15 tahun 2023 didalam perencanaan program dan kegiatan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang baik sebagai penunjang kegiatan dan program tersebut. Kaitannya dengan pelayanan yang diberikan terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah yaitu pelaksanaan pembinaan terhadap Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pengawasan baik yang rutin dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun pengawasan yang sifatnya khusus, sehingga Perangkat Daerah yang ada dapat melaksanakan setiap rekomendasi dan dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
1	Tingkat Maturitas SPIP	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	3	3,1	3,15	3,2	3,25	86%	87%	88%	89%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	3	3	3	3	3	86%	87%	88%	89%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil SAKIP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	91%	92%	93%	94%	95%	86%	87%	88%	89%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindaklanjuti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	91%	92%	93%	94%	95%	86%	87%	88%	89%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindaklanjuti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	91%	92%	93%	94%	95%	86%	87%	88%	89%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di daerah sudah tentu mempunyai standarisasi pengawasan yang cukup dengan mengacu atau berpedoman pada Peraturan-peraturan Daerah dan peraturan pemerintah. Permasalahan atau isu yang dihadapi di bidang pengawasan pada Tahun Anggaran 2024 yang perlu ditindaklanjuti dan direncanakan pada Tahun 2025 diantaranya masih kurangnya tenaga fungsional pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan serta masih minimnya anggaran yang dapat dikelola dalam bidang pengawasan, sehingga perlunya ditingkatkan alokasi anggaran untuk pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2025, sesuai permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 bahwa Pemerintah Daerah Mengalokasikan anggaran APIP yang ditetapkan berdasarkan besaran dari totalan belanja daerah dengan klasifikasi untuk kabupaten /kota dengan APBD diatas Rp2 (dua) Trilyun, anggaran APIP paling sedikit sebesar 0,5% dari total belanja daerah dan diatas Rp15 (lima belas) Milyar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. persentase temuan laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. 3. Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin. 4. Persentase sarana dan prasarana kantor.	91 %	15.600.160.191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.846.867.250

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan	86 %	80.074.100	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.074.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	51.532.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	51.532.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah	3 laporan	28.542.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah	3 laporan	28.542.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan	12 bulan	13.483.660.991	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.587.400.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	INSPEKTORAT	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang /Bulan	12.785.460.991	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	INSPEKTORAT	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang /Bulan	15.889.200.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INSPEKTORAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	597.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INSPEKTORAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	597.700.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	100.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	100.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan tupoksinya	12 bulan	538.034.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INSPEKTORAT			439.534.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	INSPEKTORAT	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 Orang	538.034.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	INSPEKTORAT	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 Orang	439.534.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	12 bulan	827.361.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INSPEKTORAT			827.361.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	17.650.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	17.650.000
Penyediaan Peralatan Rumah	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Peralatan Rumah	23 Paket	46.235.500	Penyediaan Peralatan Rumah	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Peralatan Rumah	23 Paket	46.235.500

Tangga		Tangga yang disediakan			Tangga		Tangga yang disediakan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	INSPEKTORAT	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	44 paket	189.248.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	INSPEKTORAT	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	44 paket	189.248.100
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	INSPEKTORAT	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	113.425.500	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	INSPEKTORAT	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	113.425.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	67.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	67.950.000
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	INSPEKTORAT	Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi	6 Bulan	392.852.000	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	INSPEKTORAT	Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi	6 Bulan	392.852.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT		-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.098.298.050
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INSPEKTORAT	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INSPEKTORAT	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	16 Unit	401.100.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INSPEKTORAT	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INSPEKTORAT	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 Paket	460.875.000

Pengadaan Mabel	INSPEKTORAT	Jumlah Mabel yang diadakan	-	-	Pengadaan Mabel	INSPEKTORAT	Jumlah Mabel yang diadakan	10 Paket	236.323.050
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	12 bulan	162.000.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				260.500.000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	INSPEKTORAT	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	162.000.000	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	INSPEKTORAT	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	260.500.000
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	509.030.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				553.700.000
penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	INSPEKTORAT	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	351.030.000	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	INSPEKTORAT	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	395.700.000
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	INSPEKTORAT	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 unit	65.390.000	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	INSPEKTORAT	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 unit	65.390.000
pemeliharaan/rehab ilitasi gedung kantor	INSPEKTORAT	jumlah gedung kantor dan	1 unit	92.610.000	pemeliharaan/rehab ilitasi gedung kantor	INSPEKTORAT	jumlah gedung kantor dan	1 unit	92.610.000

dan bangunan lainnya		bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitas			dan bangunan lainnya		bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitas		
PROGRAM PENYELNGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	86 %	3.843.159.100	PROGRAM PENYELNGGARAAN PENGAWASAN				4.689.159.100
Penyelenggaraam pengawasan internal	INSPEKTORAT	Terlaksananya penyelenggaran pengawasan internal	86%	3.130.786.900	Penyelenggaraam pengawasan internal				3.838.786.900
pengawasan kinerja pemerintah daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan	14.335.000	pengawasan kinerja pemerintah daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan	14.335.000
pengawasan keuangan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan	2.143.776.600	pengawasan keuangan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan	2.143.776.600
Reviu Laporan Kinerja	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	4 laporan	81.410.100	Reviu Laporan Kinerja	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	4 laporan	81.410.100
Reviu Laporan Keuangan	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 laporan	81.928.500	Reviu Laporan Keuangan	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 laporan	573.928.500

pengawasan desa	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan desa	12 laporan	463.993.400	pengawasan desa	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan desa	12 laporan	463.993.400
kerjasama pengawasan internal	INSPEKTORAT	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 kerjasama	81.079.600	kerjasama pengawasan internal	INSPEKTORAT	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 kerjasama	81.079.600
monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	12 dokumen	264.263.700	monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	12 dokumen	480.263.700
penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	INSPEKTORAT	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	86 %	712.372.200	penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu				850.372.200
penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atay daerah yang ditangani	12 laporan	87.055.400	penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atay daerah yang ditangani	12 laporan	225.055.400
pengawasan dengan tujuan tertentu	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	12 laporan	625.316.800	pengawasan dengan tujuan tertentu	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	12 laporan	625.316.800

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	91 %	578.759.700	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				653.909.700
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 rekomendas	25.987.700	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				25.987.700
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	12 rekomendasi	25.987.700	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	12 rekomenda si	25.987.700
Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	86 %	552.772.000	Pendampingan dan Asistensi				627.922.000
pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	INSPEKTORAT	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	46 perangkat daerah	81.094.200	pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	INSPEKTORAT	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	46 perangkat daerah	81.094.200
pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	INSPEKTORAT	jumlah perangk t daerah yang dilakukan pendampingan	13 perangkat daerah	14.946.000	pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	INSPEKTORAT	jumlah perangk t daerah yang dilakukan pendampingan	13 perangkat daerah	14.946.000

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	INSPEKTORAT	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 kegiatan	385.732.300	koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	INSPEKTORAT	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 kegiatan	385.732.300
pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	INSPEKTORAT	jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	3 perangkat daerah	70.999.500	pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	INSPEKTORAT	jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	3 perangkat daerah	146.149.500
				20.022.078.991					25.189.936.050

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Lampung Tengah Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025, didasarkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.4 Usulan Program Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah 2025

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	catatan penting
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT	1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 2. Persentase temuan laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 3. Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin 4. Persentase sarana dan prasarana kantor	91 %	INSPEKTORAT
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan	87 %	INSPEKTORAT
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	INSPEKTORAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah	3 laporan	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan	12 bulan	INSPEKTORAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	INSPEKTORAT	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang /Bulan	INSPEKTORAT
Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	INSPEKTORAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	INSPEKTORAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	INSPEKTORAT
Administrasi Keegawaian	INSPEKTORAT			INSPEKTORAT

Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	INSPEKTORAT	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 Orang	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan tupoksinya	12 bulan	INSPEKTORAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	INSPEKTORAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	INSPEKTORAT	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	23 Paket	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	INSPEKTORAT	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	44 paket	INSPEKTORAT
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	INSPEKTORAT	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	INSPEKTORAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu	INSPEKTORAT	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	INSPEKTORAT
penyelenggaraan rapat koordinasi koordinasi dan konsultasi SKPD	INSPEKTORAT	Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi	6 bulan	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	INSPEKTORAT
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INSPEKTORAT	Tersedianya kendaraan dinas operasional lapangan	16 unit	INSPEKTORAT
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INSPEKTORAT	Jumlah peralatan dan Mesin yang diadakan	10 Paket	INSPEKTORAT
Pengadaan Mabel	INSPEKTORAT	Jumlah Mabel yang diadakan	10 Paket	INSPEKTORAT
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	12 bulan	INSPEKTORAT
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	INSPEKTORAT	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan '	2 laporan	INSPEKTORAT

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	INSPEKTORAT
penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	INSPEKTORAT	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	INSPEKTORAT
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	INSPEKTORAT	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 unit	INSPEKTORAT
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	INSPEKTORAT	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitas	1 unit	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELNGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	87 %	INSPEKTORAT
Penyelenggaraam pengawasan internal	INSPEKTORAT	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan internal	87 %	INSPEKTORAT
pengawasan kinerja pemerintah daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan	INSPEKTORAT
pengawasan keuangan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	12 laporan	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	4 laporan	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 laporan	INSPEKTORAT
pengawasan desa	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan desa	12 laporan	INSPEKTORAT
kerjasama pengawasan internal	INSPEKTORAT	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 kerjasama	INSPEKTORAT
monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil	INSPEKTORAT	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	12 dokumen	INSPEKTORAT

pemeriksaan APIP				
penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	INSPEKTORAT	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	87 %	INSPEKTORAT
penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	INSPEKTORAT	jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atay daerah yang ditangani	12 laporan	INSPEKTORAT
pengawasan dengan tujuan tertentu	INSPEKTORAT	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	12 laporan	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT	persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	92 %	INSPEKTORAT
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Rekomendasi	INSPEKTORAT
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	12 rekomendasi	INSPEKTORAT
Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	87 %	INSPEKTORAT
pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	INSPEKTORAT	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	46 perangkat daerah	INSPEKTORAT
pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	INSPEKTORAT	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	13 perangkat daerah	INSPEKTORAT
koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	INSPEKTORAT	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 kegiatan	INSPEKTORAT
pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	INSPEKTORAT	jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	3 perangkat daerah	INSPEKTORAT

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

- Tujuan Inspektorat

Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tujuan yaitu:

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah di dukung pengawasan yang berkualitas”

- Sasaran Inspektorat

Untuk dapat mewujudkan tujuan, maka Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah menetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal pemerintah
- b. Meningkatkan Kapabilitas APIP
- c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung
- d. Meningkatkan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan internal dan Eksternal

- Sasaran Program Inspektorat

- a. Terwujudnya Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Meningkatkan praktek Pengendalian Intern OPD (Maturitas SPIP)
- c. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas APIP
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD
- e. Meningkatkan Penanganan Hasil Pemeriksaan (TLHP)

3.3 Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Mabel
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Reviu Laporan Kinerja
- d. Reviu Laporan Keuangan
- e. Pengawasan Desa
- f. Kerjasama Pengawasan Internal
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat)

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan

- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

3.2 Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP KPK)
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 3.1 Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1				INSPEKTORAT DAERAH				25.189.936.050		25.189.936.050		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.846.867.250		19.846.867.250		
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.074.100		80.074.100		
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	12 Dokumen	51.532.100	12 Dokumen	51.532.100		
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	3 Laporan	28.542.000	3 Laporan	28.542.000		
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.587.400.000		16.587.400.000		
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	INSPEKTORAT	116 Orang/bulan	15.889.200.000	116 Orang/bulan	15.889.200.000		
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INSPEKTORAT	11 Dokumen	597.700.000	11 Dokumen	597.700.000		
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INSPEKTORAT	3 Laporan	100.500.000	3 Laporan	100.500.000		
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

									439.534.000		439.534.000
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	INSPEKTORAT	71 Orang	439.534.000	71 Orang	439.534.000
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				827.361.100		827.361.100
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	INSPEKTORAT	12 Paket	17.650.000	12 Paket	17.650.000
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	INSPEKTORAT	23 Paket	46.235.500	23 Paket	46.235.500
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	INSPEKTORAT	44 Paket	189.248.100	44 Paket	189.248.100
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	INSPEKTORAT	9 Paket	113.425.500	9 Paket	113.425.500
6	1	1	2.06	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	INSPEKTORAT	1 Laporan	67.950.000	1 Laporan	67.950.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi	INSPEKTORAT	6 Bulan	392.852.000	6 Bulan	392.852.000
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.098.298.050		1.098.298.050
6	1	1	2.07	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional lapangan	INSPEKTORAT	16 Unit	401.100.000	16 Unit	401.100.000
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin yang diadakan	INSPEKTORAT	10 Paket	460.875.000	10 Paket	460.875.000
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mabel	Jumlah Mabel yang diadakan	INSPEKTORAT	10 Paket	236.323.050	10 Paket	236.323.050
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.500.000		260.500.000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	INSPEKTORAT	2 Laporan	260.500.000	2 Laporan	260.500.000
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				553.700.000		553.700.000

6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	INSPEKTORAT	16 Unit	395.700.000	16 Unit	395.700.000
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	INSPEKTORAT	72 Unit	65.390.000	72 Unit	65.390.000
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	INSPEKTORAT	1 Unit	92.610.000	1 Unit	92.610.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.689.159.100		4.689.159.100
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.838.786.900		3.838.786.900
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT	12 Laporan	14.335.000	12 Laporan	14.335.000
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT	12 Laporan	2.143.776.600	12 Laporan	2.143.776.600
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	INSPEKTORAT	4 Laporan	81.410.100	4 Laporan	81.410.100
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	INSPEKTORAT	12 Laporan	573.928.500	12 Laporan	573.928.500
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	INSPEKTORAT	12 Laporan	463.993.400	12 Laporan	463.993.400
6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	INSPEKTORAT	12 Kerjasama	81.079.600	12 Kerjasama	81.079.600
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT	12 Dokumen	480.263.700	12 Dokumen	480.263.700
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				850.372.200		850.372.200

6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	INSPEKTORAT	12 Laporan	225.055.400	12 Laporan	225.055.400
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	INSPEKTORAT	12 Laporan	625.316.800	12 Laporan	625.316.800
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				653.909.700		653.909.700
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				25.987.700		25.987.700
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	INSPEKTORAT	12 Rekomendasi	25.987.700	12 Rekomendasi	25.987.700
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi				627.922.000		627.922.000
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT	46 perangkat daerah	81.094.200	46 perangkat daerah	81.094.200
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	13 perangkat daerah	14.946.000	13 perangkat daerah	14.946.000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	INSPEKTORAT	12 Kegiatan	385.732.300	12 Kegiatan	385.732.300
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah PD yg dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	INSPEKTORAT	3 Perangkat Daerah	146.149.500	3 Perangkat Daerah	146.149.500
TOTAL									25.189.936.050		25.189.936.050

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2025 dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan 2025

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ket
		Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 2) Persentase temuan laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 3) Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin 4) Persentase sarana dan prasarana kantor	INSPEKTORAT	91%	19.846.867.250	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan	INSPEKTORAT	87%	80.074.100	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	INSPEKTORAT	12 dokumen	51.532.100	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah	INSPEKTORAT	3 laporan	28.542.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan	INSPEKTORAT	12 bulan	16.587.400.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	INSPEKTORAT	116 Orang /Bulan	15.889.200.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INSPEKTORAT	11 Dokumen	597.700.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INSPEKTORAT	3 Laporan	100.500.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan tupoksinya	INSPEKTORAT	12 bulan	439.534.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	INSPEKTORAT	71 Orang	439.534.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	INSPEKTORAT	12 bulan	827.361.100	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	INSPEKTORAT	12 Paket	17.650.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	INSPEKTORAT	23 Paket	46.235.500	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	INSPEKTORAT	44 paket	189.248.100	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	INSPEKTORAT	9 paket	113.425.500	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	INSPEKTORAT	1 Laporan	67.950.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
penyelenggaraan rapat koordinasi koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi	INSPEKTORAT	6 bulan	392.852.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	12 Bulan	1.098.298.050	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional lapangan	INSPEKTORAT	16 Unit	401.100.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin yang diadakan	INSPEKTORAT	10 Paket	460.875.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Pengadaan Mabel	Jumlah Mabel yang diadakan	INSPEKTORAT	10 Paket	236.323.050	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya penyediaan jasa penunjang	INSPEKTORAT	12 bulan	260.500.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan '	INSPEKTORAT	2 laporan	260.500.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	INSPEKTORAT	12 bulan	553.700.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	INSPEKTORAT	16 unit	395.700.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	INSPEKTORAT	72 unit	65.390.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitas	INSPEKTORAT	1 unit	92.610.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELNGGARAAN PENGAWASAN	persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	INSPEKTORAT	87%	4.689.159.100	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Penyelenggaraam pengawasan internal	Terlaksananya penyelenggaran pengawasan internal	INSPEKTORAT	87%	3.838.786.900	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT

pengawasan kinerja pemerintah daerah	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	INSPEKTORAT	12 laporan	14.335.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pengawasan keuangan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	INSPEKTORAT	12 laporan	2.143.776.600	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	INSPEKTORAT	4 laporan	81.410.100	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	INSPEKTORAT	12 laporan	573.928.500	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pengawasan desa	jumlah laporan hasil pengawasan desa	INSPEKTORAT	12 laporan	463.993.400	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	INSPEKTORAT	12 kerjasama	81.079.600	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT	12 dokumen	480.263.700	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	INSPEKTORAT	87%	850.372.200	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atay daerah yang ditangani	INSPEKTORAT	12 laporan	225.055.400	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pengawasan dengan tujuan tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	INSPEKTORAT	12 laporan	625.316.800	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	INSPEKTORAT	92%	653.909.700	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT	12 rekomendasi	25.987.700	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	INSPEKTORAT	12 rekomendasi	25.987.700	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	INSPEKTORAT	87%	627.922.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	INSPEKTORAT	46 perangkat daerah	81.094.200	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	INSPEKTORAT	13 perangkat daerah	14.946.000	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
koordinasi , monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	jumlah kegiatan koordinasi, monitoring , dan evaluasi serta evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	INSPEKTORAT	12 kegiatan	385.732.300	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	INSPEKTORAT	3 perangkat daerah	146.149.500	dana transfer umum-dana alokasi umum	INSPEKTORAT
				25.189.936.050		

BAB V

Penutup

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Dengan adanya Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, sehingga proses penyusunan Rencana Kerja anggaran Tahun 2025 dapat sesuai dengan prioritas.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dari semua pihak diperlukan untuk penyempurnaannya. Kami berharap semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta mendapat dukungan untuk pelaksanaannya.

Gunung Sugih, Januari 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



ADI SRIYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001